

28/24-07-002

# PENINGKATAN CAPACITY BUILDING MELALUI PEMANFAATAN CORAL TRIANGLE INISIATIVE\*

Ruddy Suwandi\*\*

## Pendahuluan

Inisiatif Presiden RI untuk menggolkan program penyelamatan terumbu karang di kawasan Asia Pasifik pada Pertemuan puncak Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (the Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) ke-15 di Sydney pada tanggal 8 dan 9 September 2007, merupakan sebuah tonggak sejarah dan kesempatan yang dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif, baik bagi pemerintah maupun masyarakat di sekitar ekosistem terumbu karang (ETK). Jika Indonesia berhasil melaksanakan proyek konservasi CTI ini, sebagaimana telah dijanjikan oleh beberapa negara dan organisasi-organisasi konservasi, dampak positifnya sudah jelas, baik bagi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sekitar ETK, dan juga bagi masyarakat dunia dengan isu global warming. Namun demikian, jika proyek tersebut dilakukan secara serampangan, dampak negatifnya akan semakin besar. Tidak saja karena tekanan pertambahan jumlah penduduk yang semakin besar dan akan mempengaruhi sumberdaya pesisir dan lautan yang sudah ada, tetapi juga dari pengaruh pemanasan global tersebut yang juga mengancam ETK.

Dengan disepakatinya "Coral Triangle Iniciative: Coral Reef, Fisheries and Food Security" (CTI) menunjukkan bahwa forum antar negara yang memfasilitasi masalah pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, kerjasama perdagangan dan investasi di wilayah Asia Pasifik ini telah menyadari bahwa ETK akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Inisiatif penyelamatan terumbu karang di Indonesia bukanlah hal baru. Sejak tahun 1993, pada saat Pemerintah Indonesia mencantumkan kebijakan pembangunan sub-sektor kelautan dalam GBHN 1993, maka perhatian pada rencana pembangunan wilayah pesisir mulai dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya instansi-instansi pemerintah pusat. Namun demikian, program swasembada beras yang hampir mengerahkan seluruh daya dan upaya pemerintah saat itu, telah mengurangi fokus pembangunan sumberdaya

\* Paper ini disajikan dalam Roundtable Discussion "Coral Tiangle Initiative: Coral Reef, Fisheries and Food Security: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia", yang diselenggarakan oleh BPPK, Deplu, Jakarta, 14 Desember 2007

\*\* Dosen dan Sekretaris Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor

pesisir dan lautan. Padahal jika dikelola secara profesional, hasil eksploitasi sumberdaya pesisir dan lautan yang dilakukan secara lestari sebenarnya dapat menjadi sumber biaya pembangunan yang lebih besar, jauh lebih besar dari sekedar swasembada beras.

Pada saat yang bersamaan, perhatian pemerintah daerah masih terbatas pada proyek-proyek yang bersifat bantuan dan dilaksanakan dalam rangka tugas perbantuan (*made be wind*) seperti Proyek Penyusunan Neraca Sumberdaya Kelautan dan Pesisir Daerah (*Marine Resource Evaluation and Planning Project*, MREP), COREMAP phase I, Segara Anakan, dan Riau Coastal Zone Management, serta Proyek Pesisir. Respon Pemerintah Daerah (Pemda) masih terbatas karena kewenangannya di perairan laut belum ada (DKP 2003).

Meskipun Pemda mempunyai kewenangan yang jelas dalam mengelola sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara bertanggungjawab sesuai Pasal 10 UU No. 22/99, namun kapasitasnya untuk mengelola potensi sumberdaya tersebut masih relatif terbatas, khususnya pembangunan kelautan non-perikanan di daerah-daerah. Sehingga marak terjadi pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan secara ilegal dan kurang memperhatikan aspek pelestarian sumberdaya alam. Sampai kapan kondisi seperti ini tetap berjalan dan jelas-jelas merugikan Bangsa Indonesia? Tergantung pada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, khususnya terumbu karang.

### **Optimalisasi Capacity Building (CB)**

Beberapa faktor penyebab belum optimalnya keberhasilan program "CB" adalah:

1. Program CB belum berkelanjutan. Sebagian besar hanya berorientasi pada proyek. Kurang mengakar pada masyarakat. Sebagian besar program CB pemerintah yang dilakukan masih berpikir "keproyekan". Artinya, keberlanjutan kegiatan tersebut sangat tergantung pada ada tidaknya proyek lanjutan. Jika proyek lanjutan tersebut tidak ada, maka otomatis hampir semua kegiatan tersebut hanya tinggal papan nama dan laporan di perpustakaan. Keproyekan ini juga berarti bahwa sebagian besar dana dihabiskan untuk perencanaan, koordinasi, dan kajian potensi sumberdaya alam. Proyek lanjutan yang sedianya diprioritaskan untuk implementasi di tingkat lokal sekitar ETK, belum optimal karena masalah koordinasi yang kalah cepat dari tingkat kerusakan ETK di lapangan. Sebagai ujung tombak bidang pembangunan pesisir dan kelautan, DKP sudah berupaya untuk mengatasi masalah ini dan mempercepat pembangunan kelautan melalui pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi setempat dan Pemda dengan mengadopsi konsep Sea Grant Program (Program Kemitraan Bahari). Secara kelembagaan, Program Kemitraan Bahari (*Sea Grant Program*) merupakan kerjasama antara Perguruan tinggi yang mempunyai program pokok ilmiah dibidang kelautan dengan Departemen Kelautan dan Perikanan,

Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Badan otonom daerah setempat, Unit Pelaksana Teknis - DKP, dunia usaha/swasta dan LSM yang mempunyai kepentingan. Kemitraan ini dimaksudkan untuk mendorong akselerasi pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengatasi kelemahan kapasitas kelembagaan kelautan di daerah, mengalihkan atau mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyuluhkannya ke masyarakat pesisir, sehingga pengelolaan sumberdaya pesisir dalam menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru menuju ekonomi berbasis kelautan (revolusi biru). Revolusi biru ini dikembangkan untuk memberdayakan Pemda, masyarakat pesisir dan dunia usaha dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan dengan nilai tambah yang tinggi (DKP 2003).

2. Koordinasi antar lembaga negara dan swasta dalam perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu masih belum memuaskan. Bukan cerita baru jika disebutkan bahwa koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia belum berjalan dengan baik. Berbagai lembaga pemerintah yang terlibat, baik langsung maupun tidak, dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir (seperti DKP, Departemen Transportasi, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, TNI AL, DEPLU, dll) belum berbagi peran dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan kawasan pesisir secara adil. Akibat langsung dari kondisi ini adalah terjadinya pemborosan biaya karena banyaknya program yang tumpang tindih dan dilakukan pengulangan program yang tidak perlu, serta masyarakat sekitar ETK tidak kunjung tersentuh oleh proyek.

3. Masyarakat sekitar ETK kurang dilibatkan dalam pengelolaan ETK. Beberapa program pengelolaan ETK belum melibatkan masyarakat sekitarnya sehingga tidak ada (sedikit) rasa memiliki yang bisa ditumbuhkan di sana. Karena perencanaan program tidak sepenuhnya dimunculkan dari masyarakat, maka pada saat adanya gangguan terhadap program tersebut masyarakat akan apatis dan tidak melakukan tindakan pencegahan.

4. Kurangnya fasilitator pendamping di tengah masyarakat pesisir sekitar ETK. Mengubah perilaku masyarakat pesisir bukan suatu pekerjaan mudah dan dapat dilakukan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, adanya pendamping (fasilitator) lapangan yang bertugas dalam mempertahankan dan mengembangkan pengetahuan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan ETK, akan sangat menentukan keberhasilan program CB di suatu lokasi ETK.

---

*... hasil eksploitasi sumberdaya pesisir dan lautan yang dilakukan secara lestari sebenarnya dapat menjadi sumber biaya pembangunan yang lebih besar, jauh lebih besar dari sekedar swasembada beras.*

---

Program penempatan fasilitator lapangan belum terjadwal untuk jangka waktu yang lama, sampai terjadi perubahan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian ETK. Insentif para fasilitator lapangan belum memadai, sehingga jarang sekali diantara mereka yang betah tinggal di lapangan dalam jangka waktu lama. Fasilitas transportasi, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat, fasilitator dan keluarga belum memadai, yang mempengaruhi keinginan mereka untuk tinggal selamanya di lapangan. Penghargaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap keberhasilan program CB di suatu ETK kurang disosialisasikan kepada kelompok masyarakat sekitar ETK lainnya.

5. Godaan faktor eksternal sangat besar dan nyata dibandingkan dengan pendapatan dari proyek (atau program) pelestarian. Faktor eksternal dalam hal ini terdiri dari para pedagang antara yang menampung dan mengimpor-impingi masyarakat sekitar ETK untuk mencari ikan atau hasil laut yang bernilai ekonomi tinggi, serta para nelayan asing yang membeli ikan/hasil laut dengan harga tinggi, dan berpangkalan di wilayah ZEE. Proyek yang ada di suatu ETK belum memberikan pendapatan (baik langsung maupun tidak

---

*Beberapa porsi pekerjaan adalah:  
Membangun suatu tim diplomasi  
dan advokasi hukum laut yang  
betul-betul paham tentang  
pengelolaan sumberdaya pesisir  
dan lautan secara terpadu*

---

langsung) yang memadai sehingga masyarakat tetap tergiur oleh tawaran para pedagang pengumpul lokal dan pedagang ikan dari luar negeri tersebut. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perusakan ETK oleh masyarakat sekitarnya, karena alasan kebutuhan rumah tangga.

6. Kesadaran tentang pelestarian sumberdaya terumbu karang belum mengakar sampai dibawah sadar bahwa terumbu karang yang sehat adalah jaminan kesejahteraan anak cucu. Kondisi ini yang menyebabkan pola pikir "asal untuk hari ini", masa depan anak cucu dan sumberdaya alam dan lingkungan "bagaimana besok". Mengubah pola pikir seperti ini memerlukan waktu dan ketekunan yang sangat tinggi. Peran fasilitator dan tokoh agama akan sangat menentukan kecepatan perubahan pola pikir tradisional ini. Pemerintah daerah dapat berperan besar dalam membangun CB masyarakat pesisir sekitar ETK dan kelembagaannya.

7. Pendidikan dan pengetahuan penduduk lokal tentang pengelolaan pesisir secara terpadu masih rendah. Diperlukan program nasional untuk memasukan topik-topik pendidikan dan pelatihan tentang konservasi terumbu karang khususnya, pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (*Integrated Coastal Zone Management, ICZM*) ke dalam kurikulum SD sampai SMA. Dengan cara ini, besar kemungkinan kesadaran tentang pentingnya konservasi sumberdaya

alam dan lingkungan dapat ditanamkan sampai ke bawah alam sadar. Kurikulum jenis ini juga perlu diimplementasikan secara nasional, tidak hanya sebagai bagian kecil dari mata ajaran biologi dan lingkungan.

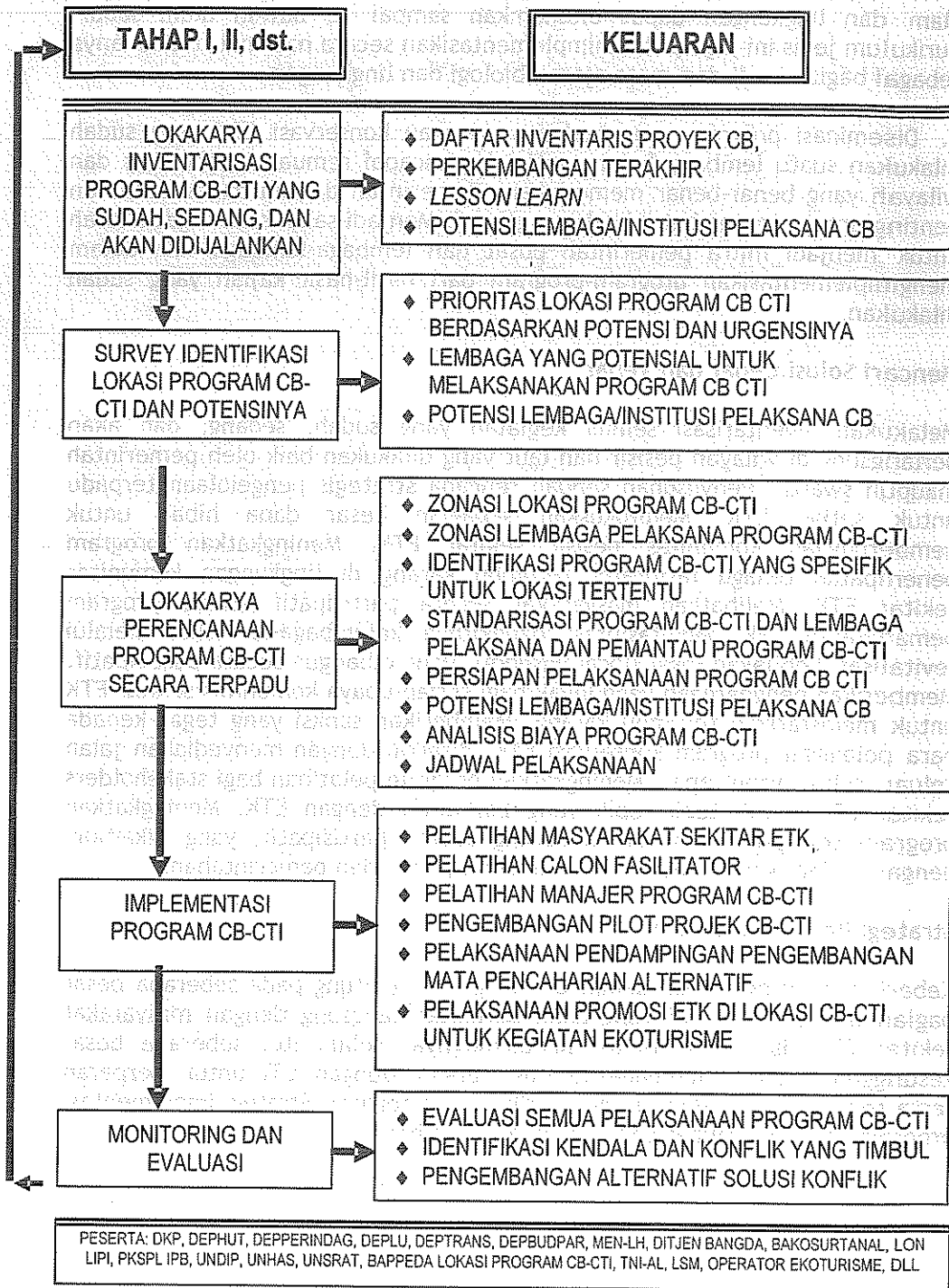
8. Diseminasi program yang berkaitan dengan konservasi ETK yang sudah dilakukan suatu lembaga belum optimal mencapai semua stakeholders dan wilayah yang benar-benar memerlukan. Pemerintah daerah dapat berperan penting untuk menjembatani kekurangan ini. Menjadi salah satu tugas daerah untuk menjadi mitra pemerintah pusat dan lembaga-lembaga lain dalam mengimplementasikan program-program dari hasil-hasil kajian yang sudah dilakukan.

### **Mencari Solusi Cepat dan Tepat**

Melakukan inventarisasi semua kegiatan yang sudah, sedang, dan akan berlangsung di wilayah pesisir dan laut yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Penyusunan sebuah rencana strategis pengelolaan terpadu untuk setiap ETK. Memfokuskan sebagian besar dana hibah untuk pemberdayaan komunitas pesisir sekitar ETK. Meningkatkan program penempatan tenaga fasilitator terumbu karang di lingkungan komunitas sekitar ETK. Melibatkan masyarakat secara partisipatif semua program pemanfaatan ETK. Memfasilitasi bangkitnya kelembagaan lokal melalui revitalisasi kebijakan lokal (local wisdom), yang dibangun secara partisipatif. Memberikan penghargaan yang layak bagi setiap upaya komunitas sekitar ETK untuk melestarikan terumbu karang. Memberikan sanksi yang tegas kepada para pelanggar program konservasi ETK, disertai dengan menyediakan jalan keluar (solusi) yang tepat. Meningkatkan program pelatihan bagi stakeholders sekitar ETK untuk topik-topik yang berkaitan dengan ETK. Meningkatkan program transplantasi terumbu karang secara partisipatif, yang dikaitkan dengan setiap bentuk kegiatan ekoturisme, politi, dan pemerintahan.

### **Strategi Pemanfaatan CTI**

Keberhasilan program CB dalam CTI sangat tergantung pada seberapa besar bagian dari program ini yang akan berkaitan langsung dengan masyarakat sekitar ETK dan faktor-faktor pendukungnya. Selain itu, seberapa besar kesungguhan setiap lembaga/institusi terkait dengan CTI untuk berperan serta secara optimal dengan memberikan yang terbaik. Strategi implementasi program CB dapat dilihat pada bagan alir Gambar 1.



Gambar 1. Strategi pelaksanaan program CB-CTI

## Peran Departemen Luar Negeri

Departemen Luar Negeri Indonesia dapat memberikan peran yang lebih signifikan dalam program CTI ini. Beberapa porsi pekerjaan adalah: Membangun suatu tim diplomasi dan advokasi hukum laut yang betul-betul paham tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan secara terpadu. Berperan aktif dalam kegiatan promosi potensi ETK di Indonesia, berkaitan dengan ekoturisme, konservasi ETK, dan advokasi kebijakan negara tetangga yang merugikan pengelolaan ETK nasional. Menjadi ujung tombak dalam mengatur kebijakan Pemerintah Indonesia yang berpihak pada upaya konservasi ETK. Menjadi ujung tombak bagi pemerintah untuk lebih memberi masukan kepada anggota legislatif tentang perannya dalam pelaksanaan program CB-CTI yang berhasil. Mengikutsertakan staf DEPLU dalam pelatihan dan pendidikan lanjutan tentang ICZM.

## Kesimpulan

Sudah saatnya program konservasi ETK langsung difokuskan pada pemberdayaan masyarakat pesisir sekitar ETK dengan mengutamakan pengembangan mata pencaharian alternatif. Melibatkan masyarakat pesisir sekitar ETK secara partisipatif dalam pengelolaan ETK, dengan meningkatkan program CB untuk SDM dan kelembagaannya. Setiap lembaga/institusi yang terlibat dapat melaksanakan perannya sebaik mungkin (*do the best*) demi bangsa, negara, dan masyarakat sekitar ETK.

---

Departemen Luar Negeri Indonesia dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam program OTI ini. Kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, forum, dan diskusi yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri dapat meningkatkan kemampuan dan wawasan diplomatik Indonesia. Selain itu, Departemen Luar Negeri dapat meningkatkan kemampuan diplomatik Indonesia dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan OTI. Melalui upaya ini, Departemen Luar Negeri dapat meningkatkan kemampuan diplomatik Indonesia dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan OTI. Melalui upaya ini, Departemen Luar Negeri dapat meningkatkan kemampuan diplomatik Indonesia dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan OTI. Melalui upaya ini, Departemen Luar Negeri dapat meningkatkan kemampuan diplomatik Indonesia dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan OTI.

### Kesimpulan

Sudah selama program konservasi ETK langsung diluncurkan pada pengembangan masyarakat peserta etnik dengan menggunakan pendekatan mata pencaharian alternatif. Melalui masyarakat peserta etnik yang berada di dalam lingkungan ETK dengan meningkatkan program ini dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dengan adanya program ini, masyarakat etnik dapat meningkatkan kualitas kehidupannya.